

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX
AVOIDANCE**
**(Studi Empiris pada Perusahaan Pertanian yang terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Periode Tahun 2013 – 2015)**

Oleh :
Calvin Pembri Gultom
Pembimbing : Zirman dan Meilda Wiguna

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : gultomcalvin@gmail.com

Influence of Good Corporate Governance toward Tax Avoidance
(Empirical Study on Agriculture Companies Listed Indosnesia Stock
Exchange for the Period of 2013-2015)

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the influence of good corporate governance toward the activity of tax avoidance at agriculture companies which are registered in Indosnesia Stock Exchange (BEI) in 2013-2015. The populations of this research are companies which have been officially registered in Bursa Efek Indonesia in 2013-2015. The samples were chosen by administrating purposive sampling methods. Thus, there are 45 samples selected. This study utilized doubled linear analysis by employing SPSS 24.0. The result of this study showed that there was significant influence on good corporate governance proxy which was the percentage of managerial ownership, the independent board of commissioners, toward the tax avoidance activity which was proxied with the Effective Tax Rate (ETR). In addition, the result of this research also demonstrated that the tax avoidance activity was not significantly influenced by the audit quality as well as audit committee.

Keywords : managerial ownership, independent commissioner, audit quality, audit committee, good corporate governance, Effective Tax Rate (ETR)

PENDAHULUAN

Bagi negara-negara yang ada di dunia ini pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah negara-negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber

penerimaan negara yang paling besar. Setiap wajib pajak (WP) diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara.

Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak

sedikit perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance*. Terkait dengan ini di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge, Hanlon, dan Edward, 2008).

Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan berbeda – beda tergantung kepentingan pihak – pihak yang terkait. Karena sifat penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meski perilaku ini akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Meski penghindaran pajak perusahaan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap masyarakat, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memberi kesan yang buruk karena masyarakat memandang bahwa aktivitas ini akan membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas (Fuest dan Riedel, 2009).

Tax avoidance merupakan segala sesuatu yang dilakukan perusahaan yang berakibat pada pengurangan terhadap pajak perusahaan (Dyrenge, Hanlon, dan Maydew 2008). Motif perusahaan pada praktik ini adalah upaya memperbesar keuntungan yang

diharapkan oleh pemegang saham, dan pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Desai dan Dharmapala 2006). Aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya sematamata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009). *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam memimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik.

Praktik penghindaran pajak membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik untuk tujuan keuntungan jangka pendek yang kemungkinan besar akan merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Minnick dan Noga 2010). *Corporate Governance* (CG) berperan penting dalam mengendalikan akibat dari permasalahan agensi dalam praktik penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala 2006; Armstrong et al. 2013).

Masalah *corporate governance* ini mulai timbul di Indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1998. Menurut (Irawan & Farahmita, 2012), terdapat survei yang menunjukkan bahwa Indonesia di tahun 2002 pernah menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi. Maka dari itu, di Indonesia sendiri telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance yang menghasilkan suatu pedoman *Good Corporate Governance*.

Corporate governance merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholders*. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006).

Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara kompensasi eksekutif dengan tindakan penghindaran pajak ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan rendah. Baik buruknya tata kelola perusahaan tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan direksi independen, kualitas audit, dan komite audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI 2013 - 2015? 2) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI 2013 - 2015? 3) Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI 2013 - 2015? 4) Apakah

komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI 2013 - 2015? 4) Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI 2013 - 2015?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 1) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI 2013 - 2015. 2) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI 2013 - 2015. 3) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI 2013 - 2015? 4) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI 2013 - 2015.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (Suandy, 2001). Dengan kata lain *Tax Avoidance* adalah *Tax Planning* yang bertujuan merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undangundang (Suandy, 2001). Istilah *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan

untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga skema tersebut legal (Darussalam & Septriadi, 2008).

Ada berbagai macam proksi pengukuran *tax avoidance* diantaranya adalah *Effective Tax Rate (ETR)*, *Cash ETR*, *Book Tax Different* dan lain sebagainya. Menurut Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada literatur penelitian terdahulu. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan.

Good Corporate Governance

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006 mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.”

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006, terdapat lima prinsip dalam *good corporate governance*. Kelima prinsip tersebut dikembangkan secara universal dengan alasan karena dapat digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem meliputi hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda-beda. Dengan demikian,

kelima prinsip tersebut dapat menjadi pedoman untuk perusahaan di semua Negara namun, diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing.

Kepemilikan Manajerial

Herawaty (2008) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan – kepentingan manajer dengan para pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai pemilik. Semakin meningkatkan proporsi kepemilikan saham manajerial maka akan semakin baik pula kinerja perusahaan. Pemusatan kepentingan dapat dicapai dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dan pemilik sejajar dapat mengurangi konflik keagenan.

Komisari Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham

yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang - kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008).

Komite Audit

Pohan (2008) dalam penelitiannya memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen.

Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak

semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya.

Teori Keagenan

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan (*agency theory*), yang diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan keyakinan para investor bahwa *agent* (manajer) akan memberikan keuntungan bagi mereka, keyakinan bahwa *agent* (manajer) tidak akan mencuri, menggelapkan bahkan menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para *agent* (manajer).

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Peningkatan persentase kepemilikan tersebut membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan tanggung

jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, apabila persentase kepemilikan saham manajerial saham kecil maka manajer hanya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan. Hal ini tidak lain karena manajer yang juga memiliki kepemilikan saham cenderung mempertimbangkan kelangsungan usahanya sehingga tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan sehingga tidak akan agresif dalam kebijakan perpajakannya (Hartadinata, 2013).

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah. Dan begitu pula sebaliknya.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Peningkatan transparansi dalam hal pajak kepada pemegang saham semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori 2010). Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas

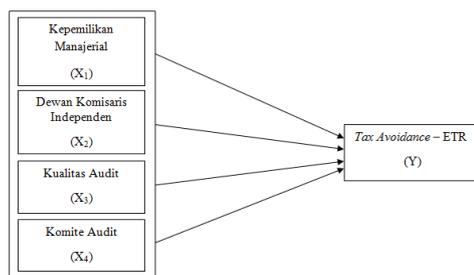
kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu 2009).

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Siallagan dan Machfoez, 2006).

Gambar 1 Model Penelitian



Sumber : Data Olahan, 2017

Hipotesis Penelitian

- H₁ : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 – 2015.
- H₂ : Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 – 2015.
- H₃ : Kualitas Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 – 2015.
- H₄ : Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 – 2015.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh Perusahaan Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun, yaitu mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling methode*. Adapun *purposive sampling methode* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Rahmawati,

2010). Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh sampel untuk perusahaan pertanian sebanyak 15 perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa *annual report* dan profil perusahaan yang berisikan penjelasan mengenai Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, dan informasi KAP yang mengaudit perusahaan yang terpilih sebagai sampel. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Tax Avoidance (Y)

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Variabel Independen

Kepemilikan Manajerial (X₁)

$$KPMJ = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham oleh manajemen}}{\text{Total saham perusahaan}}$$

Komisaris Independen (X₂)

$$KIND = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh komisaris}}$$

Kualitas Audit (X₃)

Dalam penelitian ini perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four 1, dan apabila tidak diaudit oleh keempat KAP di bawah lisensi KAP The Big Four akan diberi nilai 0.

Komite Audit (X₄)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* jumlah anggota komite audit minimal 3 orang.

Metode Analisa Data

Metode analisa data pada penelitian ini adalah :

1. Analisis Statistik Deskriptif

Deskripsi variabel tersebut disajikan untuk mengetahui nilai-nilai (mean) minimum, maksimum dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi dan variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka uji statistik menjadi tidak valid.

3. Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Gozali, 2009).

4. Analisis Regresi

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas). digunakan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

β = Kostanta

X_1 = Kepemilikan Manajerial

X_2 = Komisaris Independen

X_3 = Kualitas Audit

X_4 = Komite Audit

$B_{1,2,3,4}$ = Koefisien regresi masing-masing X

ε = Error

5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan Uji t (Uji parsial). Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial atau satu persatu antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*.

6. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
KPMJ	45	.000	.143	.03533	.045197
KIND	45	.250	.571	.40089	.088768
KUA	45	0	1	.67	.477
KOA	45	2	4	3.00	.369
ETR	45	.219	.360	.28169	.031243
Valid N (listwise)	45				

Sumber : Data Olahan, 2017

Hasil analisis statistik deskriptif dari tiap variabel adalah sebagai berikut :

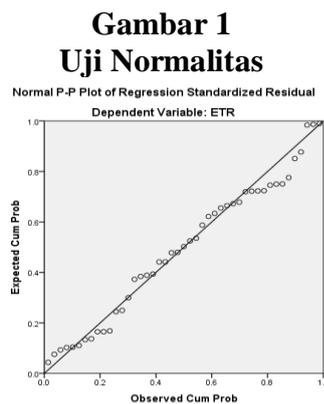
1. Kepemilikan manajerial (KPMJ) memiliki nilai rata – rata (mean) 0.035, dengan nilai minimum sebesar 0.000, Nilai maksimum

sebesar 0.143 dan nilai standar deviasi adalah sebesar 0.045.

2. Komisaris independen (KIND) memiliki nilai rata – rata sebesar 0.400, dengan nilai minimum sebesar 0.250, Nilai maksimum sebesar 0.571 dan nilai standar deviasi untuk KIND sebesar 0.088.
3. Kualitas audit (KUA) memiliki nilai rata – rata sebesar 0.67 dengan nilai minimum sebesar 0 dan standar deviasi sebesar 0.477.
4. Komite Audit (KOA) memiliki nilai rata – rata sebesar 3.00 dengan nilai minimum sebesar 2, Nilai maksimum sebesar 4 dan nilai standar deviasi sebesar 0.369.
5. *Tax avoidance* (ETR) memiliki nilai rata – rata sebesar 0.281 dengan nilai minimum sebesar 0.219, Nilai maksimum sebesar 0.360 dan nilai standar deviasi sebesar 0.031.

Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini



Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa titik – titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW Test).

Tabel 2
Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.936

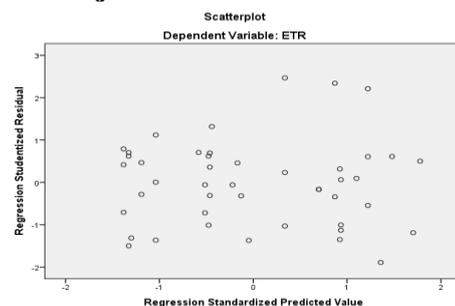
Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 1,936, ini berarti nilai *Durbin Watson* berada pada 1,55 sampai dengan 2,46 Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat diperhatikan pada Gambar *Scatterplot* sebagai berikut:

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2017

Gambar 2 menunjukkan pada tampilan grafik *scatterplots* bahwa titik-titik tidak berkumpul dan menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, gejala multikolonieritas dilihat dari: (1) nilai Tolerance dan lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF) sebagai berikut:

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X1	.717	1.394
X2	.943	1.060
X3	.742	1.347
X4	.903	1.108

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 3 diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari masalah multikolinearitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	.235	.041	5.739	.000
KPMJ	.272	.099	2.753	.009
KIND	.110	.044	2.514	.016
KUA	.016	.009	1.770	.084
KOA	-.006	.011	-.546	.588

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diperoleh persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,235 a + 0,272 X_1 + 0,110 X_2 + 0,016 X_3 - 0,006 X_4$$

1. Nilai konstanta (a) sebesar 0,235 menunjukkan bahwa apabila variabel independen (kepemilikan

manajerial, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit) bernilai 0 atau ditiadakan, maka nilai *tax avoidance* adalah sebesar 0,235 atau 23,5 %.

2. Koefisien kepemilikan manajerial (X_1) sebesar 0,272, menunjukkan bahwa setiap penambahan kepemilikan manajerial sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh penambahan nilai *tax avoidance* perusahaan sebesar 0,272 atau 27,2 %.
3. Koefisien komisaris independen (X_2) sebesar 0,110 menunjukkan bahwa setiap penambahan komisaris independen sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh peningkatan nilai *tax avoidance* perusahaan sebesar 0,110 atau 11,0 %.
4. Koefisien kualitas audit (X_3) sebesar 0,016 menunjukkan bahwa setiap penambahan kualitas audit sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh penambahan nilai *tax avoidance* perusahaan sebesar 0,016 atau 0,16%.
5. Koefisien komite audit (X_4) sebesar -0,006 menunjukkan bahwa setiap penurunan komite audit sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh penurunan nilai *tax avoidance* perusahaan sebesar 0,006 atau 0,6 %.

Hasil Uji Hipotesis

Signifikasi model regresi pada penelitian ini diuji dengan melihat nilai t dan nilai sig. yang ada di Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5
Hasik Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		

1	(Constant)	.235	.041	5.739	.000
	KPMJ	.272	.099	2.753	.009
	KIND	.110	.044	2.514	.016
	KUA	.016	.009	1.770	.084
	KOA	-.006	.011	-.546	.588

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan hasil uji t, maka akan dijabarkan sebagai berikut ini :

1. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance

Dapat diketahui nilai t hitung sebesar 2,753 dengan nilai sig (0,009 < 0,05), nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t table 2,021. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena besarnya t hitung (2,753) > t table (2,021) artinya H₁ diterima dan H₀ ditolak. Maka hipotesis pertama “diterima”.

2. Komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance

Dapat diketahui nilai t hitung sebesar 2,514 dengan nilai sig (0,016 < 0,05), nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t table 2,021. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena besarnya t hitung (2,514) > t table 2,021 artinya H₂ diterima dan H₀ ditolak. Maka hipotesis kedua “diterima”.

3. Kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance

Dapat diketahui nilai t hitung sebesar 1,770 dengan nilai sig (0,084 > 0,05), nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t table 2,021. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena besarnya t hitung (1,770) < t table 2,021 artinya H₃ ditolak dan H₀

diterima. Maka hipotesis ketiga “ditolak”.

4. Komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance

Dapat diketahui nilai t hitung sebesar 0,546 dengan nilai sig (0,588 > 0,05), nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t table 2,021. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena besarnya t hitung (0,546) < t table 2,021 artinya H₄ ditolak dan H₀ diterima. Maka hipotesis ketiga “ditolak”.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.642 ^a	.412	.354	.025120

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari hasil uji diperlihatkan pada tabel dibawah ini, dapat dilihat besarnya nilai *adjusted R²* adalah 0,354 hal ini berarti variabel – variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel *effective tax rate* (ETR) sebesar 35,4 %. Sisanya sebesar 64,6 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance

Hasil uji t menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial

berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan t hitung (2,753) > t table (2,021) dengan nilai sig. 0,009 > 0,05 yang artinya kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap ETR. Hal ini menunjukkan semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* yang diukur dengan ETR.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Oktofian (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance* yang diukur dengan *cash effective tax rate (CashETR)*. Pemegang saham terbesar merepresentasikan kelompok yang memegang kekuatan dalam RUPS, dan memiliki perusahaan, namun tidak mengelola perusahaan. Semakin tinggi persentase pemegang saham memiliki pengaruh yang lebih besar untuk menentukan kebijakan perusahaan dan dapat memastikan kebijakan tersebut dapat menguntungkan mereka.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahulae, Pratomo dan Nurbaiti (2015) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut memungkinkan bahwa pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan t hitung (2,514) > t table (2,021) dengan nilai sig. 0,019 < 0,05 yang artinya komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ETR.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fenny Winata (2014) dimana dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memiliki arti bahwa semakin besar prosentase variabel dewan komisaris independen dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam sebuah perusahaan oleh direksi dan manajemen, sehingga keberadaan mereka tidak hanya formalitas belaka (Annisa, 2012).

Dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Khairunisa (2012) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat ditarik garis merah bahwa efektivitas mekanisme pengendalian aktivitas *tax avoidance* tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu perusahaan serta peran dewan komisaris dalam aktivitas pengendalian terhadap manajemen.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Hasil uji t menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan t hitung (1,770) < t table (2,021) dengan nilai sig. 0,084 > 0,05 yang artinya kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Fenny Winata (2014) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Kualitas audit yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* maupun KAP *non The Big Four* terhadap penanggulangan praktek *tax avoidance*, hal ini dikarenakan ketika KAP mengaudit suatu laporan keuangan berpedoman pada standart pengendalian mutu kualitas audit telah ditetapkan.

Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Khairunisa (2012) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. apabila suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Hasil uji t menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan t hitung (0,546) < t table (2,021) dengan nilai sig. 0,588 > 0,05 yang artinya komite audit tidak

berpengaruh signifikan terhadap ETR.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirunisa (2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Keberadaan komite audit yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja operasional tidak berjalan dengan baik. Keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan.

Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang, kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI (Pohan, 2008).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*” **diterima**.
2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*” **diterima**.
3. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*” **ditolak**.
4. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*” **ditolak**.

Saran

1. Peneliti yang akan datang dapat mereplikasi model penelitian ini dan selanjutnya mengujikan pada industri lainnya yang terdaftar di BEI.
2. Penelitian yang akan datang dapat melakukan pengujian secara simultan.
3. Peneliti yang akan datang dapat mempertimbangkan variabel lain dalam konsep GCG seperti variabel *managerial incentives*, karakteristik eksekutif (resiko perusahaan), dewan direksi, kepemilikan keluarga dan lain-lain.
4. Dapat menggunakan pengukuran *tax avoidance* yang lain seperti *book tax gap* atau *Cash ETR*.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A. dan Kurniasih, L., (2012), Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, Mei: 123-132.
- Armstrong, C.S., J.L. Blouin, A.D. Jagolinzer, dan D.F. Larcker. 2013. "Corporate Governance, incentives, and tax avoidance. *Rock Center for Corporate Governance Stanford University, Working Paper Series No. 136*.
- Boediono, Gideon S. B. 2005. Kualitas Laba : Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi VII* Hal 172 - 194. Solo.
- Carcello at. al, 2008. *Committee Financial Competing Governance Mechanis and Management in a Post – SO, Working Paper*.
- Chai, H., dan Q. Liu. 2009. *Competition and corporate tax avoidance: Evidence from Chinese industrial firms. Economic Journal* 119 (537): 764–795.
- Cook, Kirsten A., Ryan Huston and Thomas Omer, 2008. *Earnings Managemen Through Effective Tax Rates : The Effect of Tax Planning Investments and Sarbanes-Oxley Act of 2002. Contemporary Accounting Research, Vol 25 No. 2*
- Desai, M.A., dan D. Dharmapala. 2006. "Corporate tax avoidance and high powered incentives." *Journal of Financial Economics* 79 (1): 145–179.
- Dyreng, S., M. Hanlon, dan E. L. Maydew. 2008. "Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review* 83 (2): 61–82".
- Darussalam, & Septriadi, Danny. (2008). *Cross Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan: Danny Darussalam Tax Centre*.
- DeZoort, F.T., dan Salterio, S.E. 2001. *The Effect of Corporate Governance Experience and Financial-Reporting and Audit Knowledge on Audit*

- Committee Member's Judgement. Auditing: A Journal of Practice & Theory.*, 20(2).
- Erni, 2005. Pengaruh *Insider Ownership*, Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Syariah yang terdaftar di BEI
- Fuest dan Riedel, 2014. *Tax evasion, tax avoidance and tax expenditures in developing countries: A review of the literature*
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. *Taxation and Corporate Governance. Working Paper.*
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness.*
- Pohan, H. T. 2008. Pengaruh *Good Corporate Governance*, Rasio *Tobin's q*, *Perata Laba* terhadap *Penghindaran Pajak* pada *Perusahaan Publik.*
- Rahmawati. 2006. "Model Penelitian Manajemen Laba pada Industri Perbankan Publik di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perbankan."
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. (2008) *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat